

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diterapkannya otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk menjadikan penyelenggaraan pemerintahan di daerah lebih baik dan lebih terorganisir. Pelaksanaan otonomi daerah menitik beratkan kepada daerah kabupaten dan daerah kota dimulai dengan adanya penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan ke pemerintah pusat ke pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikeluarkannya Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah maka tentu saja mekanisme pengelolaan pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan-perubahan yang mendasar. Diterapkannya otonomi daerah tentu saja akan menimbulkan penyerahaan berbagai kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintahan daerah dan disertai pula dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan. Salah satu sumber pembiayaan yang paling penting pada setiap daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terdapat komponen penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Terdapat perbedaan antara pajak daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kabupaten Garut sendiri memiliki Perda Tentang Pajak Daerah, yaitu Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah. Menurut Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah dalam BAB I Pasal 1 ayat (7) Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengertian pajak dan hotel dijelaskan dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 BAB I Pasal 1 ayat (9) dan (10) yaitu :

Ayat (9) :

“ Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.”

Ayat (10) :

“Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).”

Selanjutnya BAB III Pasal 3 dan 4 menjelaskan tentang Nama, Subyek, Obyek dan wajib pajak yang didalamnya menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh wajib pajak, sehingga

pajak hotel di wilayah kabupaten Garut dapat memenuhi target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Disamping itu terdapat adanya sanksi yang dikenakan oleh pemerintah daerah terhadap wajib pajak sebagaimana yang ditetapkan dalam Perda Kabupaten Garut BAB XIII Pasal 93 antara lain : teguran lisan, teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian tetap kegiatan, pencabutan sementara izin, pencabutan tetap izin, denda administratif dan/atau sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak diatur dalam Perda Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pajak Daerah BAB IV Pasal 25 dan 26, yaitu :

Pasal 25

“Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.”

Pasal 26

- (1) Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus untuk rumah kos, tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Manfaat Pajak Menurut Mardiasmo (2016:27) Peraturan pajak dibuat dengan didasarkan pada tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Untuk meningkatkan kesejahteraan umum aturan pajak tidak semata-mata dibuat

untuk memasok uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, akan tetapi harus memiliki sifat yang mengatur guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Penerimaan atas uang untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat: (1) Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti: jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, (2) Pertahanan dan keamanan, seperti: bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya, (3) Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak, (4) Kesejahteraan Lingkungan hidup dan Budaya, (5) Dana Pemilu dan (6) Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain: memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang.

Kabupaten Garut merupakan salah satu daerah yang diberi hak otonomi daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri guna melaksanakan pembangunan. Kabupaten Garut diharapkan mampu mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di daerah untuk kelangsungan dan kemajuannya. Potensi sumber ekonomi di Kabupaten Garut apabila terus dikembangkan dan ditingkatkan, nantinya akan mampu meningkatkan citra daerah, sehingga mampu memaksimalkan PAD. Salah satu upayanya adalah dengan memaksimalkan dan meningkatkan pajak daerah.

Potensi terbesar yang dimiliki Kabupaten Garut salah satunya adalah Pariwisata baik objek wisata pemandian air panas, pantai, kuliner, maupun tempat belanja. Terdapat banyak objek wisata favorit baik oleh turis mancanegara maupun domestik. Objek wisata yang terdapat di Kabupaten Garut yaitu: pantai Santolo, pantai Sayang Heulang, pantai Ranca Buaya, Wisata Pemandian Air Panas Cipanas Tarogong Garut, Wisata Pemandian Air Panas Darajat, Pusat Perbelanjaan Kerajinan Tangan Kulit Sukaregang Garut. Selain potensi pariwisatanya Kabupaten Garut juga memiliki beberapa potensi yang cukup potensial diantaranya yakni bidang pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan.

Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Garut (BPKAD) Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan pajak daerah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:



Tabel 1.1
Penerimaan Pajak Daerah
Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2015-2017

Jenis Pajak	Tahun Anggaran (Rp)			
	2015	2016	2017	Jumlah penerimaan
Pajak Hotel	6.873.301.142	7.363.636.722	7.229.140.123	21.466.077.987
Pajak Restoran	7.814.387.761	10.288.435.756	11.831.635.663	29.934.459.180
Pajak Hiburan	1.274.191.039	2.219.966.395	3.270.710.409	6.764.867.843
Pajak Reklame	3.378.260.602	3.604.299.409	3.597.992.305	10.580.552.316
Pajak Penerangan Jalan	20.587.428.264	21.444.796.016	26.778.744.254	68.810.968.534
Pajak Mineral	2.701.297.505	2.513.569.306	3.052.492.741	8.267.359.552
Pajak Parkir	173.741.550	204.056.920	372.447.956	750.246.426
Pajak Air Tanah	1.231.544.113	1.146.465.633	919.082.004	3.297.091.750
Pajak Sarang Burung Walet	8.180.000	10.002.000	11.050.000	29.232.000
Pajak Bumi dan Bangunan	20.293.893.686	26.148.983.974	37.629.197.130	84.072.074.790
BPHTB	9.859.700.663	8.454.564.884	18.332.919.942	18.314.265.547

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Garut (diolah), 2018

Tabel 1.1 menggambarkan berbagai jenis pajak yang ada di Kabupateng Garut. Terlihat dari sekian pajak yang ada, pajak hotel memiliki jumlah penerimaan terbesar keempat dengan jumlah Rp. 21.466.077.987, setelah pajak restoran, pajak penerangan jalan dan pajak bumi bangunan. Dengan melihat potensi yang ada, pajak hotel merupakan sektor potensial yang dimiliki oleh kabupaten Garut, dengan potensi tersebut maka pajak hotel ini

harus mendapat perhatian khusus mengingat Kabupaten Garut sangat mengandalkan sektor pariwisatanya guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Sebagai daerah otonomi Kabupaten Garut harus melakukan berbagai upaya agar lebih maju dari sebelumnya. Melalui upaya peningkatan pendapatan daerah sehingga Pendapatan Asli Daerah yang tinggi mampu menyediakan berbagai kebutuhan sarana dan prasarana publik yang baik. Salah satunya adalah ketersediaan sarana hotel yang dalam hal ini perkembangan hotel di Kabupaten Garut menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Terlihat bahwa perkembangan proporsi realisasi penerimaan pajak hotel dibandingkan dengan target penerimaan pajak hotel yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut sepanjang tahun 2015 hingga tahun 2016 mengalami kenaikan meski pada tahun 2017 mengalami penurunan. Ini bisa terjadi karena kurang efektifnya kemampuan pemerintah kabupaten dalam memaksimal pajak hotel yang telah di targetkan. Adanya penurunan ini mengindikasikan bahwa potensi pajak hotel sangat besar yang belum digali secara optimal dalam Pelaksanaannya.

Penerimaan pajak hotel yang masih dibawah potensi juga sebenarnya dikarenakan masih adanya pajak terutang atau wajib pajak yang masih menunggak pembayaran pajak. Pajak terutang ini dikarenakan kurangnya kesadaran para wajib pajak akan kewajibannya untuk membayar pajak dan

kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Garut terhadap wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak terutama terhadap pengusaha hotel yang ada di Kabupaten Garut. Selain itu, minimnya publikasi oleh pihak pemerintah daerah terkait objek wisata yang ada, mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat luas terhadap objek wisata yang ada di Kabupaten Garut. Sehingga, jumlah wisatawan yang datang pun belum cukup untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. Minimnya pegawai yang ahli dalam perpajakan juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya realisasi terhadap target pajak yang telah ditentukan, minimnya pegawai yang ahli dalam bidangnya dilihat dari data pegawai BPKAD Kabupaten Garut yang tidak ada lulusan ahli dari bidang perpajakan. Selanjutnya tidak ada sanksi yang diberikan oleh petugas penagihan pajak juga menyebabkan kurangnya kesadaran para wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak. Dengan adanya suatu kesadaran bagi wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya, pengelolaan potensi sektor wisata yang baik, dan maksimalnya penerimaan pajak oleh pegawai pajak maka Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut akan meningkat.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Garut.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang ada di latarbelakang masalah diatas maka peneliti mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Pajak hotel memiliki potensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dimana potensi yang tinggi tidak diimbangi oleh pencapaian target realisasi yang maksimal.
2. Laju pertumbuhan pajak hotel mengalami penurunan pada periode tahun 2016 – 2017 sehingga kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah juga menurun.
3. Kurang efektifnya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dalam penerimaan pajak hotel, dikarenakan terdapat wajib pajak yang tidak jujur dalam pelaporan pajaknya dan telatnya pembayaran yang dilakukan para wajib pajak.
4. Tidak adanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang telat membayar pajak.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dikemukakan diatas, maka perumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

“Bagaimana pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Garut”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui bagaimana pengaruh efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Garut”.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di bidang perpajakan dan keuangan daerah mengenai efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan atau dasar bagi penelitian-penelitian mendatang.

2. Kegunaan Praktis

Sebagai kegunaan praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan memberikan masukan atau perbandingan bagi pihak BPKAD Kabupaten Garut dalam melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penerimaan pajak hotel, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Garut.

F. Kerangka Pemikiran

Geodhart dalam Alfin Sulaiman (2011:20) memberikan penjelasan mengenai keuangan negara yakni keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutupi pengeluaran tersebut.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang dimaksud “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Menurut Mardiasmo (2016:3) pajak adalah iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontrapretasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Menyimak dari pendapat diatas bahwa pajak diperlukan dalam rangka melaksanakan pembangunan, kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak agar pemerintah dapat melaksanakan pembangunan dengan pendapatan yang berasal dari pajak.

Dikutip dalam Imam Ahmad Fauzi (2016:41) menurut steer dalam bukunya “Efektivitas organisasi” memberikan batasan pengertian efektivitas

adalah pengukuran dalam artian sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya atau mencapai semua sasaran dilihat dari jumlah kualitas dari jasa yang dihasilkan berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan menurut The Liang Gie mengemukakan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki, kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu yang memang dikehendaki. Maka orang itu dikatakan efektif kalau menimbulkan atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Mengenai hal ini pelaksanaan pemungutan pajak hotel harus dilakukan secara efektif. Menurut Saxena dalam Adam Ibrahim Indrawijaya (2010:176) efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, waktu) telah dicapai. Makin besar target yang dicapai, maka semakin tinggi tingkat efektivitas. Konsep ini orientasinya lebih tertuju pada keluaran. Masalah penggunaan masukan tidak menjadi isu dalam konsep ini. Pada umumnya organisasi pemerintah berorientasi ke pencapaian efektivitas meliputi:

1. Tepat Waktu

Tepat waktu dalam arti penyelesaian tugas yang ditetapkan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan sebelumnya. Pegawai tidak menunda

pekerjaan, tidak ada jam lembur dan setiap pekerjaan terjadwal secara pasti sehingga mudah menyelesaikannya.

2. Tepat Kualitas

Tepat kualitas dalam arti pekerjaan yang ditangani oleh pegawai sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan instansi, pekerjaan dilakukan dengan penuh ketelitian dan kesungguhan sehingga terbebas dari kesalahan dan hasil kerja dapat memberikan kepuasan kepada para pengawas (atasan atau masyarakat).

3. Tepat Kuantitas

Tepat kuantitas merupakan kemampuan pegawai untuk memenuhi target atau jumlah yang ditetapkan dan dapat menyelesaikan pekerjaan yang lebih banyak dengan tanggung jawab yang lebih besar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim & Kusufi (2012:101) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Ahmad Yani, (2011:39) Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun penjelasan Pendapatan Asli Daerah menurut Hanif Nurcholis (2007:182) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain yang sah.

Efektivitas penerimaan pajak hotel dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu menurut Marbun (2010:164) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) bersumber dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Jadi untuk meningkatkan PAD, pemerintah harus mengefektifkan sumber-sumber dari PAD. Salah satu sumber dari pajak daerah yakni pajak hotel, dengan maksimalnya pendapatan dari pajak hotel, diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi dapat membiayai proses pembangunan daerah secara maksimal.

Berdasarkan pendapat diatas yang menjadi dimensi PAD terdiri dari empat dimensi, penulis dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian dibatasi hanya satu dimensi saja yaitu pajak daerah. Karena hal ini berkaitan langsung dengan judul skripsi yang dibahas.

Oleh sebab itu efektivitas pemungutan pajak hotel sangat diperlukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Garut. Untuk lebih jelas, dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar

Kerangka Penelitian Pengaruh Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Garut

Administrasi publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial.

Nicholas Henry dikutip Harbani Pasolong (2016:8)



1. Periodik
2. Pemerintah sebagai pelaksana anggaran
3. Pelaksanaan anggaran
4. Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.

Geodhart yang dikutip Alfin Sulaiman (2011:20)



Efektivitas

1. Tepat Waktu
2. Tepat Kualitas
3. Tepat Kuantitas

Saxena, dikutip Adam Ibrahim Indrawijaya (2010:176)

G. Hipotesis

Berdasarkan pembahasan dan gambaran di atas maka penulis dapat menyimpulkan hipotesis, sebagai berikut :

1. Efektivitas penerimaan pajak berpengaruh signifikan secara Simultan terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
2. Efektivitas penerimaan pajak berpengaruh signifikan secara Parsial terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

